

BAB X

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

10.1. UMUM

Pemahaman dan penghayatan agama masih belum banyak menyentuh atau teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu maka pendidikan agama harus digunakan juga sebagai proses penyadaran masyarakat bagi terbentuknya kehidupan sosial dan kerukunan masyarakat yang lebih baik lagi.

Kondisi sosial dan budaya yang sangat beragam dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan sentuhan kebijakan dan tindak lanjut untuk mendukung perbaikan infrastruktur sosial budaya yang dimiliki Jakarta. Infrastruktur sosial ini sangat luas karena mengangkat aspek kesejahteraan di satu pihak dan partisipasi mereka dalam pembangunan di lain pihak. Gambaran kondisi ini ditentukan oleh sikap dan tingkah laku masyarakat Jakarta dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan tingkah laku masyarakat mencerminkan budaya masyarakat tersebut. Dan didalam visi disebutkan salah satu kalimatnya adalah dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudaya. Arti budaya disini bukan hanya seni budaya, akan tetapi budaya dalam arti moral, dan profesionalisme dan etos kerja. Budaya dalam arti moral berarti disiplin, hormat-menghormati, menjunjung tinggi rasa kebersamaan, dan sebagainya, sedangkan budaya dalam arti etos kerja, maksudnya adalah semangat budaya kerja yang dilandasi profesionalisme sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan di Propinsi DKI Jakarta. Pembangunan sosial dan budaya ini juga diarahkan pada pembentukan masyarakat yang partisipatif, rukun, peduli, mandiri dan demokratis.

Beragamnya masyarakat yang tinggal di Propinsi DKI Jakarta dapat dipandang sebagai suatu potensi pembangunan, tetapi dapat juga menjadi peluang bagi terjadinya konflik sosial. Luasnya cakupan pembangunan bidang sosial dan budaya di Propinsi DKI Jakarta tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah daerah, namun memerlukan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi dan masalah di bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembinaan kerukunan antar umat beragama
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana keagamaan
3. Program-program yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dirasakan belum optimal.
4. Program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal.
5. Masih belum optimalnya pelayanan pemakaman
6. Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat
7. Masih adanya potensi konflik sosial
8. Belum optimalnya penanganan pemberdayaan perempuan
9. Degradasi moral di masyarakat, terutama dilingkungan generasi pemuda sebagai dampak negatif dari kemajuan informasi, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan lain-lain.
10. Belum optimalnya pengembangan bidang kesenian dan kebudayaan
11. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan
12. Masih kurangnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai dan tinggalkan sejarah dan budaya maupun bagi para pelaku budaya yang mempunyai andil dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan permuseuman.
13. Belum terpenuhinya kebutuhan ruang interaksi publik dan fasilitas olahraga.

10.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah sebagai berikut:

Keagamaan

Membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dengan meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan ibadah menurut syariat

agama masing-masing, serta mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.

Kesejahteraan Sosial

Menciptakan iklim kehidupan yang layak berdasarkan atas azas kemanusiaan yang adil, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan anak terlantar, memantapkan penanganan PMKS, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam dalam usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat dalam permasalahan pemakaman.

Pemberdayaan Masyarakat

Menciptakan iklim kehidupan masyarakat yang layak dan kondusif melalui pembangunan ketahanan masyarakat dan penanggulangan degradasi moral masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasinya di bidang ekonomi dan sosial dari tingkat propinsi sampai tingkat kelurahan, termasuk memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender di berbagai bidang kehidupan.

Pelestarian Budaya dan Permuseuman

Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, estika, dan agama, serta tetap melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan Betawi serta kebudayaan daerah lainnya. Melakukan pembinaan dan pengembangan museum serta peninggalan sejarah dan cagar budaya yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata daerah.

Olahraga dan Kepemudaan

Menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan diri dan lembaganya sebagai wahana pendewasaan untuk berkembang dalam upaya melestarikan kader bangsa, melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya serta bahaya HIV/AIDS. Disamping itu juga meningkatkan

pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan permasalahan olahraga secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga pendidikan dan keolahragaan serta pembinaan pramuka.

10.3. STRATEGI BIDANG SOSIAL BUDAYA

Strategi yang mendukung pembangunan sosial budaya di Propinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Keagamaan

Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, meminimalkan dampak negatif kehidupan kota metropolitan serta meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk membentengi dampak negatif pembangunan dan era globalisasi.

Kesejahteraan Sosial

Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, baik di intern unit-unit pemerintahan Propinsi DKI Jakarta maupun antar unit, meningkatkan dan memantapkan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial untuk menjamin upaya-upaya perbaikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada PMKS secara terpadu antara instansi terkait dengan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemakaman.

Pemberdayaan Masyarakat

Mengoptimalkan upaya pemerintah dalam mendorong proses pembangunan di segala bidang melalui pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat seperti Dewan Kota, Dewan Kelurahan, RW, RT dan lain-lain, mengupayakan arah pembangunan yang partisipatif agar masyarakat dapat mandiri dalam proses pembangunan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan demi terciptanya ketahanan masyarakat untuk meminimalkan

potensi konflik dan degradasi moral, serta mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender.

Pelestarian Budaya dan Permuseuman

Memantapkan komitmen pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian dalam era keterbukaan dengan dukungan dan kerjasama antar instansi terkait, mempromosikan keanekaragaman budaya Betawi dan budaya daerah lainnya, khususnya dalam pengembangan industri pariwisata, pengembangan museum serta peninggalan sejarah dan cagar budaya.

Olahraga dan Kepemudaan

Mendorong masyarakat untuk hidup sehat melalui kegiatan olahraga, meningkatkan prestasi olahraga melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta kegiatan-kegiatan pekan olahraga daerah, penerapan teknologi, peningkatan pembinaan dan penghargaan kepada para atlet, pelatih dan pengurus, serta menempatkan/memberdayakan pemuda sebagai bagian dalam proses pembangunan di daerah dengan memperhatikan potensi, minat dan bakat, disamping meningkatkan kewaspadaan pemuda terhadap bahaya narkoba atau dampak negatif lainnya.

10.5. MATRIKS BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Keagamaan			
Membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dengan meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan ibadah menurut syariat agama masing-masing, serta mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya	Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, meminimalkan dampak negatif kehidupan kota metropolitan serta meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk membentengi dampak negatif pembangunan dan era globalisasi	1. Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama 2. Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan	a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan daerah b) Meningkatnya kualitas penyuluh, pembimbing, tokoh dan pemuka agama dalam pembinaan kehidupan beragama c) Berkurangnya pertikaian antar warga/masyarakat yang dipicu oleh masalah SARA a) Meningkatnya kualitas lembaga-lembaga sosial keagamaan

			<ul style="list-style-type: none"> b) Meningkatnya peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan c) Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan keagamaan d) Terlaksananya pemberian subsidi bagi lembaga pendidikan keagamaan
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Kesejahteraan Sosial			
Menciptakan iklim kehidupan yang layak berdasarkan atas azas kemanusiaan yang adil, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan anak terlantar, memantapkan penanganan PMKS, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat dalam permasalahan pemakaman	Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, baik di intern unit-unit pemerintahan Propinsi DKI Jakarta maupun antar unit, meningkatkan dan memantapkan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial untuk menjamin upaya-upaya perbaikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada PMKS secara terpadu antara instansi terkait dengan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemakaman	<p>1. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</p> <p>2. Peningkatan Peranserta Sosial Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar b) Meningkatnya jumlah pelayanan sosial dasar dan fasilitas umum yang menyediakan aksesibilitas bagi penduduk lanjut usia, cacat dan veteran c) Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat terserap dalam dunia usaha d) Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita terlantar dan anak jalanan, korban narkoba e) Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap korban tindak kekerasan, dan tuna sosial f) Meningkatnya jumlah penerima jaminan dan asuransi sosial g) Meningkatnya jumlah model pelayanan standar yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial h) Meningkatnya jumlah peraturan perundangan daerah yang tidak diskriminatif terhadap penduduk cacat dan kelompok rentan lainnya i) Meningkatnya pembinaan manajemen lembaga-lembaga sosial a) Meningkatnya jumlah dan kualitas TKSM, Orsos/LSM dan dunia usaha yang berperan aktif dalam memberikan pelayanan sosial termasuk dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Lanjutan

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		3. Peningkatan Pelayanan Pemakaman	b) Berkurangnya proporsi peran pemerintah dibanding masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial c) Meningkatnya perlindungan pada anak-anak jalanan yang tidak bersekolah d) Meningkatnya jumlah pekerja sosial dan TKSM terdidik dan terlatih yang didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial e) Meningkatnya sosialisasi tentang bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya di sekolah-sekolah dan masyarakat kelurahan a) Meningkatnya kemudahan pemberian fasilitas pemakaman bagi masyarakat umum b) Menurunnya biaya pemakaman c) Meningkatnya pelayanan petugas pemakaman d) Meningkatnya pelayanan pemakaman bagi warga yang tidak mampu e) Berkurangnya tanah produktif yang digunakan masyarakat bagi makam keluarga f) Semakin tertibnya penataan lahan pemakaman

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Pemberdayaan Masyarakat			
Menciptakan iklim kehidupan masyarakat yang layak dan kondusif melalui pembangunan ketahanan masyarakat dan penanggulangan degradasi moral masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasinya di bidang ekonomi dan sosial dari tingkat propinsi sampai tingkat kelurahan, termasuk memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender di berbagai bidang kehidupan	Mengoptimalkan upaya pemerintah dalam mendorong proses pembangunan di segala bidang melalui pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat seperti Dewan Kota, Dewan Kelurahan, RW, RT dan lain-lain, mengupayakan arah pembangunan yang partisipatif agar masyarakat dapat mandiri dalam proses pembangunan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan demi terciptanya ketahanan masyarakat untuk meminimalkan potensi konflik dan degradasi moral, serta mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender	<p>1. Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</p>	<p>a) Meningkatnya pembinaan terhadap PMKS dalam hal keterampilan untuk dapat hidup mandiri tanpa merugikan orang lain.</p> <p>b) Meningkatnya penyuluhan tentang sadar hukum dan bahaya narkoba.</p> <p>c) Menurunnya tingkat kerawanan sosial</p> <p>d) Meningkatnya pelayanan dan bantuan pada korban bencana.</p> <p>e) Meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>f) Menurunnya jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta.</p> <p>g) Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin</p> <p>h) Tersedianya pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin melalui pemberian beasiswa</p> <p>i) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin</p> <p>j) Meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk SD dan SLTP</p> <p>a) Semakin berperannya Dewan Kelurahan dalam menjalankan fungsinya</p> <p>b) Terpenuhinya prasarana dan sarana yang dibutuhkan masyarakat</p> <p>c) Bertambahnya usaha-usaha rumah-tangga yang memperoleh dana bergulir</p> <p>d) Meningkatnya peran warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kelurahan</p>

Lanjutan

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		3. Pemberdayaan Perempuan	a) Meningkatnya peranan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik b) Meningkatnya Kesetaraan dan keadilan Jender c) Menurunnya persentase perempuan yang buta huruf d) Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan e) Meningkatnya jumlah dan proporsi perempuan yang menamatkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan f) Berkurangnya tindak diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja g) Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Pelestarian Budaya dan Permuseuman			
Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, estika, dan agama, serta tetap melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan Betawi serta kebudayaan daerah lainnya. Melakukan pembinaan dan pengembangan museum serta peninggalan sejarah dan cagar budaya yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata daerah	Memantapkan komitmen pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian dalam era keterbukaan dengan dukungan dan kerjasama antar instansi terkait, mempromosikan keanekaragaman budaya Betawi dan budaya daerah lainnya, khususnya dalam pengembangan industri pariwisata, pengembangan museum serta peninggalan sejarah dan cagar budaya	1. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 2. Pengembangan museum dan pelestarian peninggalan budaya/sejarah cagar 3. Pengawasan Pemugaran	a) Terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada nilai budaya nasional b) Berkembangnya budaya dan kesenian Betawi sebagai sumber daya pengembangan pariwisata daerah c) Terwujudnya sistem nilai budaya Betawi yang diperkaya oleh budaya nasional yang serasi dan kondusif e) Meningkatnya jumlah kunjungan ke sarana kebudayaan dan kesenian a) Bertambahnya keragaman objek wisata yang berbasis seni, budaya dan peninggalan sejarah b) Meningkatnya wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke museum-museum dan peninggalan sejarah di Propinsi DKI Jakarta c) Meningkatnya sistem informasi seni budaya, peninggalan sejarah dan permuseuman d) Meningkatnya pemeliharaan museum, cagar budaya dan peninggalan bersejarah a) Meningkatnya daya tarik bangunan dan lingkungan bersejarah b) Bertambahnya bangunan dan lingkungan bersejarah c) Meningkatnya apresiasi pelajar dan masyarakat akan peninggalan bersejarah

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
<p>Olah Raga dan Kepemudaan</p> <p>Menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan diri dan lembaganya sebagai wahana pendewasaan untuk berkembang dalam upaya melestarikan kader bangsa, melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya serta bahaya HIV/AIDS. Disamping itu juga meningkatkan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan permasalahan olahraga secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga pendidikan dan keolahragaan serta pembinaan pramuka</p>	<p>Mendorong masyarakat untuk hidup sehat melalui kegiatan olahraga, meningkatkan prestasi olahraga melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta kegiatan-kegiatan pekan olahraga daerah, penerapan teknologi, peningkatan pembinaan dan penghargaan kepada para atlet, pelatih dan pengurus, serta menempatkan/memberdayakan pemuda sebagai bagian dalam proses pembangunan di daerah dengan memperhatikan potensi, minat dan bakat, disamping meningkatkan kewaspadaan pemuda terhadap bahaya narkotika atau dampak negatif lainnya</p>	<p>1. Peningkatan Peran Kepemudaan dan Pramuka</p> <p>2. Peningkatan Prestasi Olahraga</p> <p>3. Pembinaan Olahraga Masyarakat</p>	<p>a) Terciptanya peran serta organisasi kepemudaan dalam proses pembangunan daerah</p> <p>b) Meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika</p> <p>c) Meningkatnya jumlah keanggotaan pramuka pada siswa tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah</p> <p>d) Meningkatnya dukungan pemerintah daerah bagi kegiatan pembinaan kepemudaan dan pramuka.</p> <p>a) Meningkatnya peran KONI Daerah sebagai induk organisasi olahraga di daerah</p> <p>b) Meningkatnya prestasi olahraga daerah</p> <p>c) Meningkatnya jumlah dan kualitas kompetisi seluruh cabang olahraga</p> <p>d) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olahraga</p> <p>e) Meningkatnya dukungan dunia usaha dalam pengembangan kegiatan dan sarana olahraga</p> <p>a) Meningkatnya minat masyarakat berolahraga</p> <p>b) Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah masyarakat setempat</p> <p>c) Meningkatnya perkumpulan olahraga masyarakat.</p>